

Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

**Yelvina Andriani
2009/98619**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENGARUH KOMPETISI POLITIK, TINGKAT PENDIDIKAN,
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
INFORMASI NON KEUANGAN DALAM WEBSITE PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA**

Oleh:

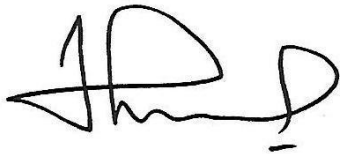
YELVINA ANDRIANI

98619 / 2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi / tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2015 dan telah diperiksa / disetujui oleh kedua pembimbing.

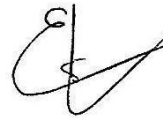
Padang, Februari 2015

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak,
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera

Yelvina Andriani

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : yhina.akt@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine: (1) The effect of political competition on the level of disclosure of non-financial information in government websites (2) The effect of educational level on the level of disclosure of non-financial information in government websites (3) The effect of population on the level of disclosure of non-financial information in government websites.

A population of this study are the whole website and the City District Government in Sumatera. A sample of this study 111 in government website. A data collection used a score checklist. Data was analyzed using SPSS program with multiple regression analysis as statistical tool.

The results showed that: (1) Political Competition positive significant effect on the level of Non-Financial Disclosure in Local Government Websites (2) Education level of positive significant effect on the level of Non-Financial Disclosure in Local Government Websites (3) Population is not a positive significant effect on the level of Non-Financial Disclosure in Local Government Websites.

Keywords: Political Competition, Level of Education, Population, and The level of disclosure of non-financial information

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Tingkat Pengungkapan informasi Non Keuangan dalam Website Pemda , (2) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda, (3) Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Website Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera. Sampel pada penelitian ini berjumlah 111 Website Pemda. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan Skor Checklist. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetisi Politik berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda, (2) Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda, (3) Jumlah Penduduk Tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non keuangan dalam Website Pemda.

Kata Kunci: Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk ,Tingkat Pengungkapan Informasi non keuangan

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang NO.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan diberikannya wewenang yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, maka pengelolaan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti kata pepatah “*with great power comes great responsibility*” bertambahnya wewenang memunculkan tanggung jawab tambahan. Masyarakat sebagai stakeholder terpenting pemerintah daerahnya dan sejauhmana pemerintah daerah yang mereka pilih benar-benar melaksanakan tugas dan amanat yang telah diberikan kepada mereka secara bertanggung jawab. Disisi lain calon investor, wisatawan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya juga memerlukan informasi tentang daerah dan pengelolaannya untuk mengambil keputusan.

Website Pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan Pemerintah Daerah kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad et. Al 2005). Laswad et.al. (2005) meneliti *internet financial reporting* Pemda New Zealand. Penelitian berfokus kepada faktor-faktor yang dianggap paling relevan mempengaruhi hasil dari *internet financial reporting* Pemda New Zealand. Faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan adalah: (1) Kompetisi politik. (2) *Size*, (3) *Leverage*, (4) Kekayaan Pemda, (5) *Press visibility*. (6) Tipe Pemda. Hasil penelitian Laswad et.al. (2005) menunjukkan bahwa *size* dan tingkat kompetisi politik bukan merupakan faktor yang memiliki

asosiasi dengan tingkat *internet financial reporting*. Pemda yang memiliki tingkat *leverage* dan tingkat kekayaan yang lebih tinggi memiliki tingkat *internet financial reporting* yang lebih tinggi.

Menurut Suwardjono, secara umum tujuan dari pengungkapan (*disclosure*) adalah menyajikan informasi yang di pandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pengungkapan dimaksudkan untuk menyediakan informasi uang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan dari pengguna. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawasan berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Menurut Bodnar George dan William (2000:5) mendefenisikan informasi sebagai data yang berguna yang diolah sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan Gord an (1974) dalam Jogyanto (2000:25) informasi merupakan data yang telah diolah kedalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami dalam keputusan sekarang atau masa depan. Dari pengertian di atas tentang informasi, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diproses dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan.

Menurut Bardhan dan Yang (2004) dalam Nairobi (2014) kompetisi politik adalah kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan mengendalikan pemerintahan dan mengalokasikan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan politik dan kepentingan masyarakat. Menurut Downs (1957) dalam Nairobi (2014), kompetisi politik diartikan sebagai kompetisi antara kandidat untuk mendapatkan suara terbanyak dari pemilih untuk menjalankan suatu platform kebijakan yang layak dijalankan.

Menurut Notoatmodjo (2003) pendidikan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru. Pengetahuan juga diperoleh melalui kenyataan (fakta) dengan melihat dan mendengar sendiri, serta melalui alat-alat komunikasi, misal membaca, mendengar radio dan televisi. Menurut Soekanto (2002) tingkat pendidikan seseorang akan membantu orang tersebut untuk lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka tingkat pemahaman juga meningkat serta tepat dalam pengambilan sikap.

Menurut Said (1995) penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Proses kelahiran dan kematian tidak terjadi secara serentak di setiap daerah. Begitu juga dengan perpindahan. Proses proses demografi tersebut yang menyebabkan jumlah penduduk di setiap daerah berbeda. Jumlah penduduk yang berbeda memiliki permintaan informasi yang berbeda. Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu stakeholder terpenting Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah

penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar.

Teori signalling menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, penjelasan lebih detail dalam website. Pemda dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa Pemda telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Jika dibandingkan dengan konten yang dianjurkan dalam blueprint terkait *e-government* dari Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, website Pemda di Indonesia masih banyak yang belum mengungkapkan informasi sesuai dengan blueprint tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Pemda yang memberikan pengungkapan informasi terkait fungsi sistem pemerintahan dalam website.

Di luar negeri, penelitian pengungkapan informasi laporan keuangan dipelopori oleh laswad et.al (2005). Di Indonesia sendiri, terlihat bahwa pemerintah daerah masih cenderung memprioritaskan pengungkapan informasi fiskal kepada publik. Penelitian yang dilakukan oleh Henri Agustin (2014) menngungkapkan pemerintah kabupaten dan kotamadya di propinsi Sumatera Barat menggunakan website pemda untuk mempublikasikan dokumen terkait dengan pengelolaan anggaran.

Berkaca pada hasil penelitian sebelumnya tersebut terlihat tingkat pengungkapan informasi keuangan diukur dalam bentuk pengungkapan secara menyeluruh informasi tentang anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal ini hubungan antara masyarakat

dan pemerintah digambarkan seperti hubungan *principal* dan *agent* dalam *agency theory*, dimana pengungkapan informasi keuangan oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Sutaryo (2013) mengenai *Determinant Internet Financial Local Reporting in Indonesia* penelitiannya adalah kompetisi politik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, size tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Wicaksono (2013) mengenai Pengungkapan Informasi Non-keuangan tentang Pelayanan Publik melalui Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, hasil penelitiannya adalah ukuran dari Pemda memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Pemda dalam website. Artinya, Pemda dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemda dengan jumlah penduduk lebih sedikit.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada website Pemda Kabupaten dan Kota di Sumatera belum semuanya mengeluarkan informasi keuangan, dari hasil pengamatan sementara yang penulis lakukan dari seluruh website kabupaten dan kota di Sumatera hanya ada dua Pemda yang mengeluarkan informasi keuangan, sehingga membuat penulis lebih tertarik meneliti tentang tingkat pengungkapan informasi non keuangan, karena informasi non keuangan juga tidak kalah pentingnya. dari setiap website kabupaten dan kota di Sumatera Pengungkapan Informasi yang disajikan lebih banyak berisi tentang ceremonial pemerintahan, sedangkan pengungkapan

informasi non keuangan tidak terkelola dengan baik, sehingga fenomena ini akan mempengaruhi kinerja dan karakteristik pemda dalam tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam Website Pemda.

Maka berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan **"Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera"**.

1. Bagaimanakah Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda ?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam website pemda?
3. Bagaimanakah Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda ?

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda
3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kompetisi Politik

Berdasarkan penelitian Laswad et.al., (2005) dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetisi politik dan Internet Financial Reporting (IFR). Semakin tinggi level political competition, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan secara sukarela juga akan semakin tinggi. Internet merupakan sarana paling mudah dan murah bagi pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangan sebagai bukti kinerja pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi dengan adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya.

2. Tingkat Pendidikan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hameed (2005) dan Piotrowski dan Ryzin (2007), kondisi sosial ekonomi suatu populasi memiliki hubungan positif dengan transparansi. Variabel terkait kondisi sosial ekonomi tersebut antara lain tingkat pendidikan, jumlah layanan jasa Pemda dan ketenagakerjaan. Dalam risetnya di Spanyol, Gandia (2007) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat transparansi keuangan pemerintah daerah. Seiring dengan Gandia, Tolbert et al. (2008) menemukan korelasi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan permintaan terhadap informasi kepada pejabat publik. Jadi menurut pendapat peneliti bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dianggap dapat membuat masyarakat menjadi lebih kritis dan meminta informasi yang lebih banyak kepada Pemerintah

daerah.

3. Jumlah Penduduk

Sesuai dengan Stakeholder Theory, penduduk merupakan salah satu stakeholder terpenting Pemerintah Daerah, oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar. Riset pendahuluan tentang transparansi keuangan di pemerintah daerah di New Jersey telah mengungkapkan hubungan positif antara jumlah penduduk dengan pengungkapan informasi keuangan (Piotrowski & Bertelli, 2010). Sementara itu dalam hubungannya dengan transparansi di bidang informasi sosial dan lingkungan di website pemerintah daerah di Spanyol, jumlah penduduk juga menunjukkan relasi yang sama (Garcia-Sanchez, 2013). Jadi menurut peneliti Pemda dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemda dengan jumlah penduduk lebih sedikit.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Aditya dan Sutaryo (2013) mengenai *Determinant Internet Financial Local Reporting in Indonesia* penelitiannya adalah kompetisi politik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, size tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

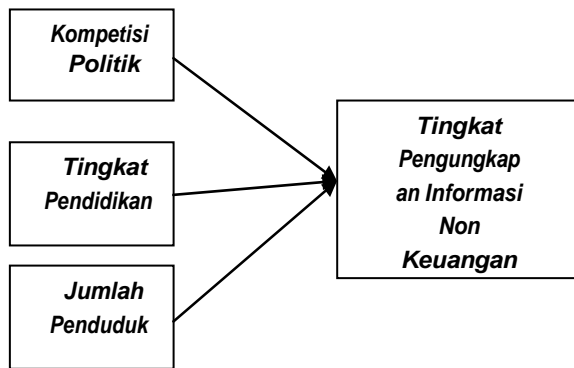
Penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Wicaksono (2013) mengenai Pengungkapan Informasi Non-keuangan tentang Pelayanan Publik melalui Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, hasil penelitiannya adalah ukuran dari Pemda memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Pemda dalam website. Artinya, Pemda dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemda dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Penelitian ini hanya berfokus pada informasi yang bersifat

non-keuangan yang selama ini belum banyak dilakukan peneliti terdahulu dan akan mengelaborasi hubungan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dalam Website Pemda.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda sebagai variabel dependen, Kinerja dan Karakteristik Pemda sebagai variabel independen.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Website Pemda Kabupaten Kota di Sumatera. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengamati website kabupaten kota di Sumatera kurun waktu satu bulan pada tahun 2014.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diolah terlebih dahulu dan merupakan data yang telah dipublikasikan kepada umum melalui lembaga resmi yang telah ditentukan. Menurut waktu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam *cross section*. Data *cross section* adalah data yang berasal dari satu tahun tetapi terdiri dari banyak sampel. Data dari penelitian ini selama tahun 2014.

2. Sumber Data

Data dari penelitian ini bersumber dari situs resmi Pemda, dan situs-situs lain yang diperlukan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini diawali dengan melakukan content-analysis seluruh website kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang dapat diakses dalam kurun waktu sebulan dalam tahun 2014. Data pengungkapan non-keuangan dikumpulkan dengan menggunakan checklist yang dikembangkan berdasarkan PP no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil dari checklist tersebut kemudian dianalisis untuk menyajikan informasi non keuangan apa saja yang paling banyak ditampilkan oleh Pemerintah Daerah di website-nya. Setelah dianalisis secara kualitatif, berdasarkan dugaan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka tingkat pengungkapan informasi non-keuangan ini akan dianalisis dengan regresi untuk melihat signifikansi pengaruh dari kondisi sosial

ekonomi yakni kompetisi politik, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, kekayaan daerah di tiap kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda.

2. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah Kompetisi Politik (X_1), Tingkat Pendidikan (X_2), Jumlah Penduduk (X_3).

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skor checklist yang dinilai dengan angka 1 (ada) dan 0 (tidak ada) untuk setiap item checklist .

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah .

Analisis Konten

Diawali dengan content-analysis seluruh website kabupaten dan kota di Sumatera yang dapat diakses dalam kurun waktu sebulan dalam tahun 2014. Data pengungkapan non-keuangan dikumpulkan dengan menggunakan checklist yang

dikembangkan berdasarkan Penelitian Martani (2013) tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil dari checklist tersebut kemudian dianalisis untuk menyajikan informasi non keuangan apa saja yang paling banyak ditampilkan oleh Pemerintah Daerah di website-nya. Adapun konten terdiri dari konten informasi, berita, ketersediaan link website dinas terkait.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $>0,05$ maka akan berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lain, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Varians Inflating Factor*) kecil dari 10 dan tolerance besar dari 0,10.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

1. Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item yang ditanyakan
2. Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus (Sugiono,2004:74)
3. Menghitung nilai rerata jawaban responden
4. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskripsi variabel

Nilai persentase dimasukan kedalam kriteria sebagai berikut:

- a. Interval jawaban responden 76%-100% kategori jawabannya baik
- b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik
- c. Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik.

2. Metode Analisis Data

a. Uji Regresi Berganda

Alat uji yang digunakan adalah *Regresi Linear Berganda*. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1\text{POLCOM} + b_2\text{EDU} + b_3\text{SIZE} + e$$

Dimana :

Y= Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan

B_{123} = Koefisien regresi dari variable independen

X_1 = Kompetisi Politik

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = Jumlah Penduduk

a = constant

e= epsilon

b. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak, nilai $\text{sig } 0,000^a < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistic yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

b. Uji t (t-test)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan $\beta = 0,05$ kesimpulan hipotesis yang disajikan untuk H_1, H_2, H_3, H_4 didasarkan atas:

1. Jika tingkat signifikansi $\leq \beta = 0,05$ maka tersedia bukti yang cukup untuk menerima hipotesis H_1 dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Jika tingkat signifikansi $\geq \beta = 0,05$ maka hipotesis H_1 s.d H_2 ditolak dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Definisi Operasional

1. Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan

Pengungkapan menjelaskan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan yang dilakukan oleh Pemda dalam hal pelayanan publik. Variabel ini diukur dengan jumlah skor checklist yang dinilai dengan angka 1 (ada) dan 0 (tidak ada) untuk setiap item checklist, sesuai dengan metode pengukuran tingkat pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalam penelitian Garcia-Sanchez et al. (2013). Perbedaan variabel ini dengan penelitian di Spanyol adalah checklist dalam penelitian ini dikembangkan sesuai dengan PP no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan wajib dan pilihan pemerintah pusat dan daerah. Checklist dibuat untuk menangkap seluruh urusan yang wajib dikerjakan dan urusan pilihan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Skor maksimal dalam checklist tersebut adalah 116 yang terbagi dalam tiga kelompok yakni informasi, berita dan link ke dinas terkait sesuai dengan urusan yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Kompetisi Politik

Semakin tinggi level political competition, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi secara sukarela.

Juga akan semakin tinggi. Internet merupakan sarana paling mudah dan murah bagi pemerintah daerah untuk melaporkan informasi sebagai bukti kinerja pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya. Variabel kompetisi politik diproksikan dengan rasio koalisi partai pendukung kepala daerah pemenang

pemilu. Sumber data adalah dari partai politik pendukung kepala daerah.

3. Tingkat Pendidikan

Penelitian ini akan menggunakan tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu Pemda untuk mengukur variabel tingkat pendidikan (level of education). Tingkat pendidikan akan diukur dengan rata-rata lama sekolah dari penduduk suatu Pemda. Sumber data adalah hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2014.

4. Jumlah Penduduk

Penelitian Piotrowski dan Bertelli (2010) menemukan bahwa jumlah penduduk yang semakin besar akan meningkatkan permintaan terhadap transparansi publik, begitu juga dengan Garcia-Sanchez et al. (2013). Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan jumlah penduduk sebagai proksi untuk variabel size of municipality yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Jumlah Website Pemda di Sumatera adalah 144 Website, Sedangkan Website Pemda yang tidak bisa diakses ada 33 Website Pemda, dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 111 Website Pemda Kabupaten/kota di Sumatera yang diamati kurang lebih satu bulan. (Tabel 1)

Analisis Konten

Hasil penghitungan skor checklist terkait informasi non keuangan atas pelayanan pada Website Pemda menunjukkan bahwa Kota Batam memperoleh nilai tertinggi 70 dari 116 item atau sekitar 60,34 % dari total item. Dari 10 hasil checklist terbaik, Pemda yang

mengungkapkan informasi di Website dengan Skor Paling tinggi adalah Kota Batam, Kota Pekanbaru, Kabupaten Phak Phak Barat, Kabupaten Siak, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Rokan hilir, Kabupaten Agam, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Banda Aceh. Di sisi lain ada 2 Website Pemda yang memiliki skor checklist terendah adalah Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Hasil uji normalitas residual dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji *kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorov smirnov* dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal, dengan melihat nilai $\alpha > 0,05$. Dari analisis data diperoleh hasil bahwa residual terdistribusi secara normal. Dari tabel uji normalitas terbukti nilai *kolmogorov smirnov* sebesar 1,038 dan nilai signifikansinya $0,231 > 0,05$

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation factor (VIF) < 10* dan *tolerance > 0,1*. Variabel Kompetisi Politik (X_1) dengan nilai VIF 1.031, Tingkat Pendidikan (X_2) dengan nilai VIF 1.041, Jumlah Penduduk (X_3) dengan nilai VIF 1.012. Pada Kompetisi Politik (X_1) dengan nilai *tolerance* 0,970, Tingkat Pendidikan (X_2) dengan nilai *tolerance* 0,960, Jumlah Penduduk (X_3) dengan nilai *tolerance* 0,988 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu sama yang lainnya, atau variabel *independen* pada penelitian bebas multikol.

3. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji normalitas residual dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji *gletser*. Uji *Gletser* dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dengan melihat nilai sig. $> 0,05$. Dari analisis data diperoleh hasil bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Dari tabel uji normalitas terbukti nilai signifikansinya Kompetisi Politik (X_1) $0,140 > 0,05$. Tingkat Pendidikan (X_2) $0,281 > 0,05$. Jumlah penduduk (X_3) $0,334 > 0,05$. Berdasarkan hasil diatas, sig variabel-variabel $> 0,05$ (sig $> 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

4. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya maupun nilai sesudahnya dengan nilai d terlihat pada tabel 15. Berdasarkan uji autokorelasi ditemukan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,039 berada pada kisaran 1,55 – 2,46 yang berarti bahwa variabel terbebas dari autokorelasi.

Pengujian Model

1. Uji F

Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil uji regresi berganda, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik

atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan cara membandingkan F_{tabel} dan F_{hitung} . Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig > \alpha$ 0,05. Nilai F_{tabel} pada α 0,05 adalah 2,68949. Nilai F_{hitung} adalah 3,234 sedangkan nilai sig adalah 0,025. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha$ 0,05 yaitu $3,234 > 3,0138$ dan sig $0,025 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (*R square*)

Nilai *Adjusted R square* menunjukkan 0,057. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda adalah 5,7% sedangkan 93,4% ditentukan oleh faktor lain. Nilai *Adjusted R square* dapat dilihat pada tabel berikut:

3. Koefisien Regresi

Koefisien regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$. Secara rinci hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Pada tabel 22 diatas dapat disubsitusikan ke dalam estimasi sebagai berikut :

$$Y = 0,553 + 1,150 \text{ POLCOM} + 0,204 \text{ EDU} + 0,119 \text{ SIZE} + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Pengungkapan
 A = Konstanta
 b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi
 POLCOM= Kompetensi Politik
 EDU = Tingkat Pendidikan
 SIZE = Size Of Municipality
 e = Standar Error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 0,553 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Kompetensi politik, tingkat pendidikan dan jumlah penduduk adalah nol maka nilai tingkat pengungkapan 0,553.
- Koefisien Kompetensi politik sebesar 1,150 satuan. artinya jika kompetensi politik mengalami kenaikan satu satuan, maka tingkat pengungkapan akan mengalami peningkatan sebesar 1,150 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 1,150.
- Koefisien Tingkat pendidikan sebesar 0,204 satuan, artinya jika Tingkat pendidikan mengalami kenaikan satu satuan, maka Tingkat pengungkapan akan mengalami peningkatan sebesar 0,204 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif 0,204.
- Koefisien Jumlah Penduduk sebesar 0,119 satuan, artinya jika Jumlah Penduduk mengalami kenaikan satu satuan, maka Tingkat Pengungkapan akan mengalami

peningkatan sebesar 0,119 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X3 bernilai positif 0,119.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) t_{hitung} dengan t_{tabel} atau (b) nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha$ 0,05. Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel .

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α (0,05) adalah 1,9816. Pada variabel Kompetisi Politik (X₁) nilai t_{hitung} adalah 2,116 dan nilai sig adalah 0,037. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,116 > 1,9816$ atau nilai signifikansi $0,037 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X₁ bernilai positif yaitu 1,150. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H₁ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan Kompetisi Politik (X₁) berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis kedua jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α (0,05) adalah 1,9816. Pada variabel Tingkat Pendidikan (X₂) nilai t_{hitung} adalah 2,452 dan nilai sig adalah 0,016. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,452 > 1,9816$ atau nilai signifikansi $0,016 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X₂ bernilai positif yaitu 0,204. Jadi hipotesis yang telah

dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H₂ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan Tingkat Pendidikan (X₂) berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis kedua jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α (0,05) adalah 1,9816. Pada variabel Jumlah Penduduk (X₃) nilai t_{hitung} adalah 1,012 dan nilai sig adalah 0,314. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,012 < 1,9816$ atau nilai signifikansi $0,314 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X₂ bernilai positif yaitu 0,119. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H₃ ditolak. Hal ini sesuai penelitian terdahulu Aditya dan Sutaryo (2013) mengenai *Determinant Internet Financial Local Reporting in Indonesia* bahwa Size tidak berpengaruh terhadap pengungkapan.

IV. Pembahasan

1. Kompetisi Politik

Berdasarkan hasil pengujian variabel Kompetisi Politik terhadap Tingkat Pengungkapan. Dapat diketahui bahwa variabel kompetisi politik berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam website Pemda. Oleh karena itu dapat dinyatakan hipotesis pertama (H₁) diterima.

Semakin tinggi level *political competition*, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi secara sukarela

juga akan semakin tinggi. Internet merupakan sarana paling mudah dan murah bagi pemerintah daerah untuk melaporkan informasi sebagai bukti kinerja pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Penelitian Aditya dan Sutaryo (2013) dengan adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya.

2. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil pengujian variabel Tingkat pendidikan terhadap tingkat pengungkapan informasi. Dapat diketahui bahwa variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam website Pemda.

Semakin tinggi rata-rata lama sekolah yang menjadi proksi dari tingkat pendidikan. Maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan Pemda dalam website. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan Martani dan Nastiti (2013). Pemda yang penduduknya memiliki tingkat Pendidikan yang lebih tinggi, maka akan semakin terdorong dan memiliki keinginan untuk melaporkan kegiatannya ke masyarakat.

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pengujian variabel Jumlah Penduduk (*Size of the Public*) terhadap tingkat Pengungkapan Informasi non keuangan dalam website Pemda. Dapat diketahui bahwa variabel Jumlah Penduduk (*Size of the Public*) tidak terbukti signifikan mempengaruhi tingkat Pengungkapan informasi non keuangan dalam website Pemda. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Sutaryo tentang *Determinant Internet Financial*

Local Reporting in Indonesia, bahwa *Size* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda ” ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetisi Politik mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemda . Artinya Semakin tinggi level *political competition*, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi secara sukarela juga akan semakin tinggi. Internet merupakan sarana paling mudah dan murah bagi pemerintah daerah untuk melaporkan informasi sebagai bukti kinerja pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat (H_1 diterima).
2. Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah yang menjadi proksi dari tingkat pendidikan. Maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan Pemda dalam website (H_2 diterima).
3. Jumlah Penduduk (*Size*) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dalam website Pemda (H_3 ditolak).

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa masih sedikitnya Pemda yang melakukan pengungkapan informasi non-keuangan bahkan informasi yang dianjurkan oleh Kemkominfo menunjukkan masih rendahnya motivasi Pemda untuk berusaha menyediakan informasi kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, menindaklanjuti hasil penelitian ini, perlu dibuat standarisasi pengungkapan non-keuangan yang sama untuk setiap daerah di tingkat nasional, agar masyarakat dimanapun tempatnya mampu mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerahnya dengan baik.
2. Kedua, rendahnya pengungkapan informasi tentang program anti korupsi, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, program sosial dan lingkungan menunjukkan masih rendahnya keberpihakan pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi dan pemberdayaan masyarakat serta rendahnya kesadaran pemerintah daerah dalam hal-hal sosial dan lingkungan. Hal ini perlu menjadi perhatian penting Pemerintah Pusat agar memantau tata kelola pemerintah daerah demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, berpihak kepada masyarakat dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan di masa depan.
3. Bagi Penelitian selanjutnya peneliti menyarankan periode pengamatan

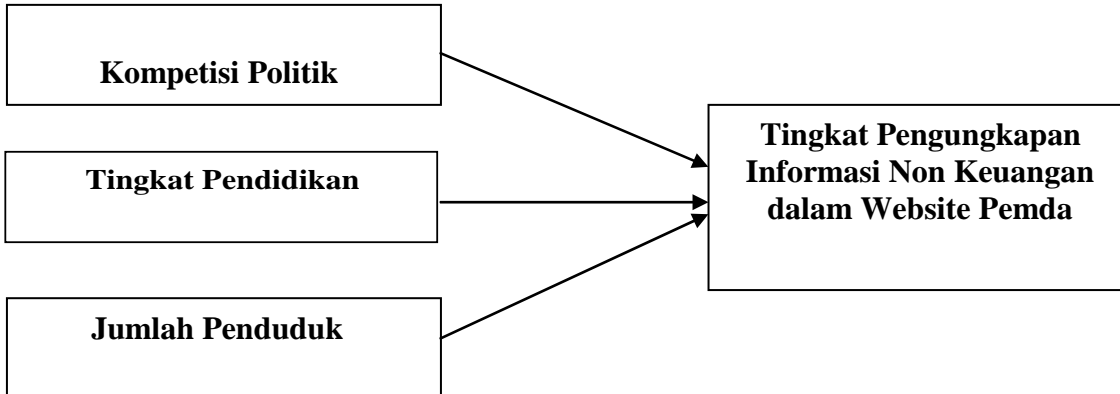
website yang lebih panjang dan bisa dilakukan lebih dari 2 kali di kesempatan yang berbeda untuk menghindari masalah aksesibilitas website.

Daftar Pustaka

- Alfaiz.Rizkika.D, 2013. Pengaruh Karakteristik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan melalui website.Skripsi Sarjana FE Universitas Diponegoro.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bodnar.George.H, William Hopwood S 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*.Jakarta: Salemba Empat
- Gracia-Sanchez, I.M., Frias-Aceitune, J.V. & Rodriguez-Dominguez, L. 2013. *Determinants of Corporate Social*
- Henri Agustin. 2014. *Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat*. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Tehnologi Informasi (SNATI) Yogyakarta. Hal A-7 – A12
- Idris.2010. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS Edisi Revisi III*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- 15 Jogyanto. 2000. *Sistem Informasi Berbasis Komputer*. Edisi Kedua Yogyakarta: BPFE.
- Kementrian Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2003. *Blueprint Sistem Aplikasi Egovernment Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*.

- Laswad, F., Fisher, R. & Oyelere, P. 2005. Determinants of voluntary internet financial reporting by local financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24 (2), 101-121.
- Martani,D., Nastiti, D. & Wicaksono, P. 2013. Pengungkapan Informasi Non-keuangan tentang Pelayanan Publik melalui Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, Sesi II/11, September.
- Nairobi. 2014 *Kompetisi Politik Lokal di Indonesia: Studi dalam Perspektif Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Perez, C. C., Hernandez, A. M., & Bolivar, M. P. (2005). Citizen access to on-line governmental financial information: Practices in the European Union Countries. *Government Information Quarterly* Vol 22, 258-276.
- Piotrowsky, S.J., & Bertelli, A. 2010. Measuring Municipal Transparency. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.
- Roberts, R.W., 1992. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: and application of stakeholder theory. *Accounting Organization and Society* 17, 595-612.
- Rahman,A.,Sutaryo.,2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, Sesi I/11, September.
- Sulistiyo, D.K., Negara, H.P. & Firdaus, Y. 2008. Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Semnas Informatika UPN Veteran Yogyakarta. Mei.
- Sumarjo,H.2010. Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.Skripsi FE Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto,S. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Website
- Website Pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Sumatera.
- Website BPS Kabupaten dan Kota di Sumatera.

LAMPIRAN



Gambar
Kerangka Konseptual Penelitian

Hasil Uji Analisis

A. Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pengungkapan	111	5	70	17.77	10.248
Kompetisi Politik	111	.03	.83	.3164	.17677
Tingkat Pendidikan	111	6.10	11.30	8.2598	1.15996
Size of Municipality	111	35982	1846262	384617.88	321378.654
Valid N (listwise)	111				

B. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97865336
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		1.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.231

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.553	1.704		.324	.746		
Kompetisi Politik	1.150	.544	.199	2.116	.037	.970	1.031
Tingkat Pendidikan	.204	.083	.232	2.452	.016	.960	1.041

Size of Municipality	.119	.117	.094	1.012	.314	.988	1.012
----------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan
 Sumber Data : Olahan SPSS 2014

3. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.547	3.720		-2.297	.024
Kompetisi Politik	1.766	1.187	.142	1.488	.140
Tingkat Pendidikan	.405	.182	.213	2.226	.281
Size of Municipality	.248	.256	.091	.970	.334

a. Dependent Variable: LNRES_2

4. Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.288 ^a	.083	.057	.99228	2.039

a. Predictors: (Constant), Size of Municipality, Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan

b. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan

Pengujian Model

1. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9.554	3	3.185	3.234	.025 ^b
Residual	105.354	107	.985		
Total	114.908	110			

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan

b. Predictors: (Constant), Kompetisi Politik, Size of Municipality, Tingkat Pendidikan

2. KoefisienDeterminasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.288 ^a	.083	.057	.99228

a. Predictors: (Constant), LN_x3, Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan

b. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan

3. Koefisien Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.553	1.704		.324	.746
Kompetisi Politik	1.150	.544	.199	2.116	.037
Tingkat Pendidikan	.204	.083	.232	2.452	.016
Size of Municipality	.119	.117	.094	1.012	.314

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan